

ANALISIS KONTRIBUSI FAKTOR-FAKTOR PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KLATEN

Abdul Haris¹, Rismanto Gatot Trisilo², Tri Utami³

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma
dzulhari@gmail.com

² Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma
riesmku03@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma
uut1989@gmail.com

Article Info	Abstract
ARTICLE HISTORY	
Received:	<i>The purpose of this study was to determine the factors that influence economic growth in Klaten Regency. This type of research is descriptive qualitative or policy research. This research was conducted in Klaten district. The data sources of this research are primary and secondary data from Klaten district. Data analysis using the Klassen Method and regional disparities will be used using the Williamson Index calculation and Gini Index data. The results of this study based on the spatial aspect show that the use of agricultural land is still wide enough so that it is not worried about large-scale changes in land use and from the non-economic aspect that population growth is low but population density is high enough, TPAK and unemployment rates have decreased, HDI is equal to 74.79% shows a positive development and the condition of the poor in 2018 has also decreased.</i>
13/12/2021	
Reviewed:	
30/12/2021	
Revised:	
11/01/2022	
Accepted:	
11/01/2022	
DOI: 10.54840/wijob.v1i1.13	

Keywords : Analysis, Contribution, Economic Growth Factors

PENDAHULUAN

Pembangunan di Kabupaten Klaten akan diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing daerah, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah. Berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah kabupaten Klaten, maka Pembangunan tahun 2019 diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, penguatan potensi ekonomi lokal, pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Untuk tercapainya tujuan ini, pemerintah daerah dan masyarakat sebaiknya mengambil inisiatif pembangunan daerah bersama-sama. Pemerintah daerah dan didukung partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia perlu memperkirakan potensi sumberdaya dalam merancang dan membangun perekonomian daerah (Lincoln Arsyad, 1999).

Ada beberapa indikator dalam mengetahui derajat kesenjangan terkait PDRB, antara lain, indeks pembangunan manusia (IPM), kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB, dan tingkat kemiskinan. Melalui data PDRB dapat mengetahui tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi juga parameter yang lain seperti Location Quotient (LQ), struktur ekonomi, dinamika ekonomi bahkan disparitas antar wilayah.

Jika dilihat dalam kurun waktu tertentu, kontribusi sektoral, khususnya Sektor Pertanian sering berfluktuasi. Berfluktuasinya pertumbuhan sektor ini mudah untuk dimaklumi, karena Sektor Pertanian yang diharapkan menjadi salah satu sektor basis sering mengalami gagal panen akibat dari gangguan dalam proses produksi seperti adanya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serangan tikus, wereng, sundep, faktor cuaca dan sebagainya. Untuk mengetahui kondisi pembangunan suatu daerah juga dapat dilihat dari aspek IPM. Terhadap hal ini, jika dilihat dari indikator penduduk yang tercermin dari IPM meliputi (kesehatan, pendidikan, daya beli), Jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 151,730 jiwa (12.96%), kondisi ini mengalami penurunan dibanding jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 yaitu sebesar 164,990 jiwa (14.15%). Dan jumlah penduduk miskin di Klaten masih relatif tinggi jika dibandingkan kabupaten se eks-karisedenan Surakarta

Dari aspek lain, di Kabupaten Klaten juga memiliki Komoditi Unggulan Berbasis Kluster. Kesemuanya ini memiliki asset dan income milyaran rupiah. Dengan adanya beberapa kluster dan ekonomi kreatif lainnya, maka perlu diketahui agar bisa memberikan gambaran terhadap dinamika ekonomi wilayah.

Dari beberapa uraian terhadap kelebihan (positif) dan kekurangan (negatif) beberapa faktor tersebut di atas, maka dapat dijadikan dasar perlu adanya Kajian Ekonomi Daerah Kabupaten Klaten, yang hasilnya nanti dapat juga dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membuat arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah Kabupaten Klaten khususnya jangka pendek. Masalah pokok yang akan ditelaah dalam kajian ini antara lain:

1. Bagaimana kondisi perekonomian daerah Kabupaten Klaten khususnya Tahun 2018, yang dilihat dari Aspek spasial dan Aspek Non Ekonomi?
2. Sejauh mana pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja dalam mengurangi pengangguran, rasio beban tanggungan, pengurangan terhadap kemiskinan dan perbaikan perekonomian masyarakat secara umum ?
3. Bagaimana tingkat pembangunan manusia, seperti dilihat dari IPM ?
4. Kebijakan Pembangunan/Program dan Kegiatan yang tepat yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya jangka pendek mendatang?

Tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi dan dapat dijadikan salah satu dasar perencanaan terhadap penguatan ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Klaten mendatang.

Bagian ini mencakup tentang latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan (penelitian atau pengabdian). Bagian ini juga menjelaskan mengenai tujuan kegiatan, rencana pemecahan masalah, dan kontribusi penelitian. [*Times New Roman*, 11, normal].

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011:331) “pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Perekonomian tumbuh jika semua balas jasa riil thd penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan dua macam faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi. Menurut Sukirno (2011:332) Ada empat faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Daya Alam

Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.

b. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas.. Menurut Schumpeter, wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

c. Akumulasi Modal

Pembentukan modal adalah kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja.

d. Kemajuan Teknologi

Teknologi merupakan faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, karena berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil teknik

penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Keduanya akan membawa perekonomian kerah ekonomi skala besar yang selanjutnya menentukan perkembangan industri. Perbaikan kerja dapat meyebabkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011: 335), ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi pemerintah menurut para ahli ekonom antara lain sebagai berikut:

1. Teori Sollow Swan

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi.

2. Teori Harrod-Domar

Teori ini menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara mantap (steady growth). Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu sebagai berikut:

- a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang ada dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian terdiri atas dua sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save = MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (capital output ratio = COR) dan rasio antara penambahan modal-output (incremental capital-output ratio = ICOR)

3. Teori Schumpeter

Teori ini mengemukakan bahwa ada lima macam kegiatan yang dimasukkan sebagai inovasi yaitu sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan produk baru.
- b. Memperkenalkan cara berproduksi baru
- c. Adanya perubahan organisasi industri menuju efisiensi.
- d. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.
- e. Pembukaan pasar-pasar baru.
- f. Adanya perubahan organisasi industri menuju efisiensi.
- g. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.

h. Pembukaan pasar-pasar baru.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian Ekonomi Daerah Kabupaten Klaten ini menggunakan metode survei, yaitu penelitian dilakukan dengan menggali secara lebih detil tentang informasi yang ada dilapangan, baik melalui data primer maupun data sekunder. Dalam kajian Analisis Data dilakukan secara deskriptif kualitatif, tidak dilakukan uji statistik/kuantitatif. Untuk membantua membuat diskripsi terhadap Pola Pertumbuhan Wilayah menggunakan Disparitas wilayah akan digunakan dengan menggunakan perhitungan Indeks Williamson

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kajian Ekonomi Daerah Kabupaten Klaten ini akan dimuat data- data penting, yang meliputi beberapa aspek dan variabel, yakni 1) Aspek Spasial, 2) Aspek Ekonomi, 3) Aspek Non Ekonomi., namun pada penelitian kali ini hanya mengalisis aspek spasial dan aspek non ekonomi dulu. Aspek spasial, antara lain meliputi Letak Astronomis/Geo-Ekonomi, Peruntukan Lahan (*Land Use*), Luas Pengurangan Lahan Sawah dan Kecenderungan Pengurangan Lahan. Aspek ekonomi, beberapa yang dikaji antara lain variable ekonomi, seperti seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi, pola pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, share menurut kategori lapangan usaha, *Location Quotient* (LQ), Disparitas Wilayah dan Dinamika Ekonomi Wilayah dan Keuangan Daerah. Aspek Non Ekonomi, antara lain meliputi Sosio-demografi, kesejahteraan social, seperti IPM. Data-data yang ada dalam kajian ini diuraikan sebagai berikut.

Aspek Spasial/Keruangan

Lahan Pertanian dan Non Pertanian

Sebagaimana yang tertuang dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 65.556 Ha. Luas tersebut penggunaannya diklasifikasi menjadi Lahan Pertanian (Sawah dan Bukan Sawah) dan Lahan Bukan Pertanian. Lahan Pertanian selama kurun waktu 5 (lima) tahun rata-rata memiliki luas lahan yang relatif stabil yakni 33.344 Ha Lahan Sawah dan 6.424 Ha Lahan Bukan Sawah. Dengan demikian lahan pertanian relatif stabil yakni sebesar 60,66%. Begitu juga lahan bukan pertanian selama kurun waktu lima tahun relatif stabil yakni memiliki luas 25.789 Ha (39,34%). berturut-turut 33.314 Ha pada Tahun 2012, seluas 33.220 Ha pada Tahun 2013 dan pada Tahun 2014 sebesar 33.166 Ha (Lihat Tabel 3.1) di bawah.

Dalam upaya mengendalikan alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031, maka ditetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Klaten seluas lebih kurang 32.451 Ha yang harus dipertahankan. Dari data dan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan lahan untuk lahan pertanian masih cukup luas, sehingga belum menunjukkan kekhawatiran akan terjadi perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran. Kondisi ini perlu dipertahankan dengan berbagai

kebijakan dan strategi, mengingat Kabupaten Klaten sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Tengah.

Luas dan Percepatan Pengurangan Lahan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Klaten Nomor Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 65.556 Ha. Jika diamati luas pengurangan lahan sawah ke penggunaan lain, baik berupa Perumahan, Industri, Perusahaan dan Jasa selama kurun 4 (empat) tahun persebarannya tidak sama.

1. Pada Tahun 2015 sebesar 106 Ha, wilayah kecamatan yang mengalami pengurangan lahan cukup besar dari 6 Ha hingga 18 Ha, ada 7 Kecamatan yaitu tersebar di Kecamatan Klaten Tengah 6 Ha, Kecamatan Karangnom 7 Ha, Kecamatan Prambanan 8 Ha, Kecamatan Delanggu 10 Ha, Kecamatan Klaten Selatan 11 Ha, Kecamatan Klaten Utara 11 Ha. Dan Kecamatan Ceper 18 Ha
2. Pada Tahun 2016 sebesar 48 Ha, wilayah kecamatan yang mengalami pengurangan di atas 6 Ha, hanya ada 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Ceper 7 Ha, dan Kecamatan Delanggu 7 Ha.
3. pengurangan lahan kurang dari 6 Ha.
4. Pada Tahun 2018 sebesar 1078 Ha, seluruh wilayah kecamatan yang mengalami pengurangan lahan cukup besar antara 6 Ha hingga 175 Ha, dan hanya ada 4 Kecamatan yang pengurangan lahan dibawah 6 Ha, yaitu Kecamatan Prambanan 4 Ha, Kecamatan Bayat 4 Ha, Kecamatan Krangdowo 1 Ha dan Kecamatan Kemalang 3 Ha

Kecenderungan Pengurangan Lahan Sawah.

Dari beberapa data Pengurangan Lahan sawah, maka perubahan penggunaan lahan ini masih mempunyai kecenderungan terbesar pada 7 wilayah kecamatan. jika dihitung selama kurun waktu 2015-2017 luas pengurangan lahan sawah sebesar 6 Ha sampai 18 Ha. Pada tahun 2018 Kecenderungan pengurangan lahan mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu mencapai sebesar 175 Ha yang terjadi di Kecamatan Cawas. Dan pengurangan lahan diatas 50 Ha hingga 97 Ha ada 7 Kecamatan, yang tersebar di Kecamatan Jogonalan dengan luas 97 Ha, Kecamatan Ceper dengan luas 97 Ha, Kecamatan Polanharjo 84 Ha, Kecamatan manisrenggo dan Wonosari masing-masing 77 Ha, Kecamatan tulung seluas 66 Ha dan Kecamatan Juwiring seluas 55 Ha. Perubahan yang cukup besar dimungkinkan karena adanya tumbuh kawasan industri baru, dan juga semakin berkembangnya daerah wisata baru yang ada di kabupaten Klaten. Hal yang paling penting adalah mengendalikan pola ruang sesuai dengan peruntukannya dan peran stakeholder, sehingga perubahan fungsi lahan dengan adanya pengurangan luas lahan sawah benar-benar dapat dikendalikan.

Aspek Non Ekonomi.

Jumlah, Pertumbuhan dan KepadatanPenduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten mengalami peningkatan selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir, yakni Tahun 2016 hinggaTahun 2018, pada Tahun 2016 jumlah penduduk sebesar 1.163.218 jiwa, pada Tahun 2017 sebanyak 1.167.401 Jiwa, dan pada Tahun 2018 sebanyak

1.171.411, sehingga tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 2016 sampai tahun 2018 rata-rata sebesar 0,35%.

Di dalam ilmu demografi, pertumbuhan penduduk dikatakan meledak (*explosion*) jika pertumbuhan penduduk per tahun lebih dari 2 %, pertumbuhan cepat jika pertumbuhan penduduk pertahun antara 1,00-1,99%, pertumbuhan rendah jika memiliki pertumbuhan penduduk 0,05-0,09% per tahun, tetap (*stationery*) jika pertumbuhan penduduk 0,00% dan pertumbuhan negatif jika pertumbuhan penduduk kurang dari 0,00%. Jika melihat data tersebut, maka pertumbuhan penduduk di Klaten relatif rendah. Untuk melihat data jumlah penduduk bisa dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1

Jumlah, Kepadatan Dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018

NO	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017	2018
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.163.218	1.167.401	1.171.411
2.	Pertumbuhan Penduduk (%)	0.38	0.36	0.35
3.	Kepadatan Penduduk per Km ²		1780,77	1786,89

Sumber: *Bappeda Klaten, 2019*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan partisipasi angkatan kerja yaitu :

- 1) General Economic Activity Ratio (Rasio Aktifitas Ekonomi Umum), rasio ini khusus untuk penduduk usia kerja, atau biasa disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja.

Rumus:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Tabel 2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2018.

NO	Tahun 2018		
	Jml Ang Kerja	Jml Pdd Usia Kerja	TPAK (%)
1	616.680	923.027	66.81

Sumber: BPS Klaten,

Melihat persentase tingkat partisipasi kerja di kabupaten Klaten cukup baik, karena sebesar 66.81 % memiliki aktivitas yang produktif, walaupun belum bisa menggambarkan secara rinci, karena

masih perlu dilihat jumlah penduduk usia kerja yang memang kerja atau bukan (sekolah atau menganggur)

- 2) Age-Sex-Specific Activity Ratio adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk per kelompok umur dan jenis kelamin (age-sex group)

Rumus:

$$ASSR = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja tiap kelompok umur jenis kelamin}}{\text{Jumlah Penduduk tiap kelompok umur jenis kelamin}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun) dan berdasar tabel 3,38 menunjukkan bahwa usia angkatan kerja di Kabupaten Klaten masih di dominasi usia antara 25 tahun samapai 60+.

Jika kita lihat perbandingan antar jenis kelamin, maka TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini kemungkinan di Indonesia, tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya laki-laki, sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja.

Tabel 3

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk per kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2018

NO	Umur	Laki AK	Pdd	%	Perempuan AK	Pdd	%	Total
1	15-19	11.695	574.824	2.03	6.840	596.587	1.15	18.535
2	20-24	21.502	574.824	3.74	20.366	596.587	3.41	41.868
3	25-29	36.859	574.824	6.41	25.284	596.587	4.24	62.143
4	30-34	36.478	574.824	6.35	26.698	596.587	4.48	63.176
5	35-39	38.532	574.824	6.7	27.304	596.587	4.58	65.836
6	40-44	39.614	574.824	6.89	31.747	596.587	5.32	71.361
7	45-49	37.520	574.824	6.53	29.036	596.587	4.87	66.556
8	50-54	36.226	574.824	6.3	32.318	596.587	5.46	68.544
9	55-59	31.976	574.824	5.56	25.561	596.587	4.28	57.537
10	60+	61.337	574.824	10.7	39.787	596.587	6.67	101.124
	Jumlah	351.739			264.941			616.680

Pengangguran.

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja

contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

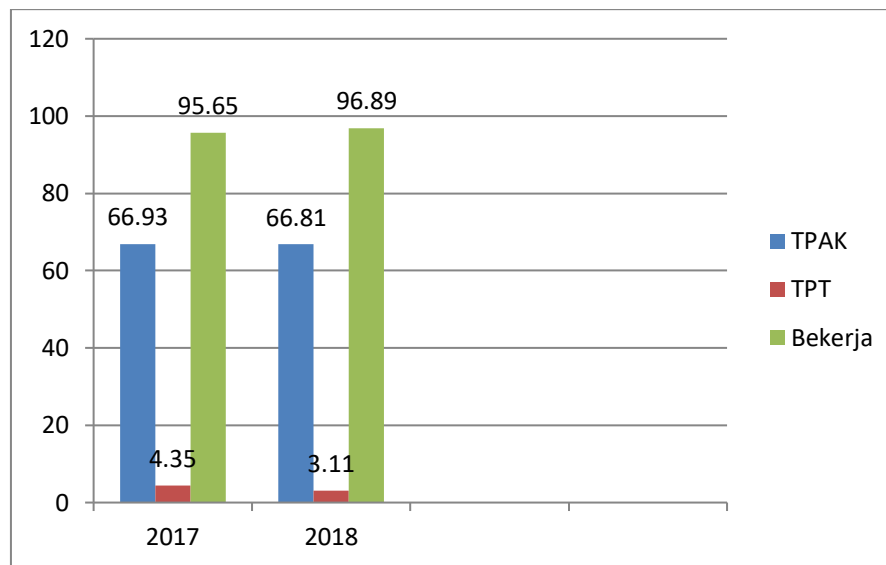
Angkatan kerja

adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Angkatan kerja dikelompokkan 4 golongan, yaitu :

1. Mereka yang bekerja penuh adalah angkatan kerja yang aktif menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan produksi.
2. Pengangguran terbuka atau *open unemployment* adalah mereka yang sama sekali tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan (sewaktu-waktu siap bekerja)
3. Setengah menganggur atau *under unemployment* adalah mereka yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikan/keahliannya atau tidak menggunakan sepenuh tenaganya karena kekurangan lapangan pekerjaan. Contoh :Seorang sarjana bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya.
4. Pengangguran tersembunyi/tersamar atau disebut *disguise employment*, artinya suatu pekerjaan dikerjakan oleh pekerja yang berlebihan sehingga mereka tidak bekerja maksimal.

Tenaga kerja(*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja (usia 15 tahun lebih) yang potensial yang potensial memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000 (hasil Sensus Penduduk 1971 dan 1980, dan 1990) usia bekerja dimulai sejak umur 10 tahun, namun sejak tahun 2000 sesuai ketentuan internasional maka usia kerja adalah 15 tahun atau lebih. Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk berarti masih tinggi pula pertumbuhan angkatan kerja. Diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk, karena struktur penduduk Indonesia yang tergolong muda. *TPAK dapat diperoleh dengan membagi jumlah angkatan kerja dengan dengan jumlah penduduk usia kerja dikalikan seratus persen.*

Menurut Mantra (2003), menganggur tidak sama dengan tidak bekerja tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau bekerja, tidak dapat dikatakan sebagai pengangguran. Seseorang baru dikatakan menganggur bila dia ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja, namun tidak mendapatkannya. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan. Untuk menghitung besarnya tingkat pengangguran adalah merupakan prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, atau *Tingkat Pengangguran adalah Jumlah penduduk yang menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan seratus persen.* Berikut ini dimuat data-data TPAK, TPT, Jumlah Pengangguran seperti pada Tabel 3.39 di bawah ini. Data yang ada selalu mengalami fluktuasi, naik dan turun. TPAK Tahun 2016 adalah 67,79 %, pada tahun 2018 turun menjadi 66,81 % . Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan yang signifikan, pada Tahun 2016 sebesar 4,35%, Tahun 2018 sebesar 3,11% . Untuk penduduk yang bekerja pada juga mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar 95,65%, Tahun 2018 sebesar 96,86% , hal ini memberikan gambaran bahwa strategi pembangunan di kabupaten Klaten dapat sudah berjalan dengan baik, meski demikian masih perlu ada upaya yang lebih serius lagi untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi

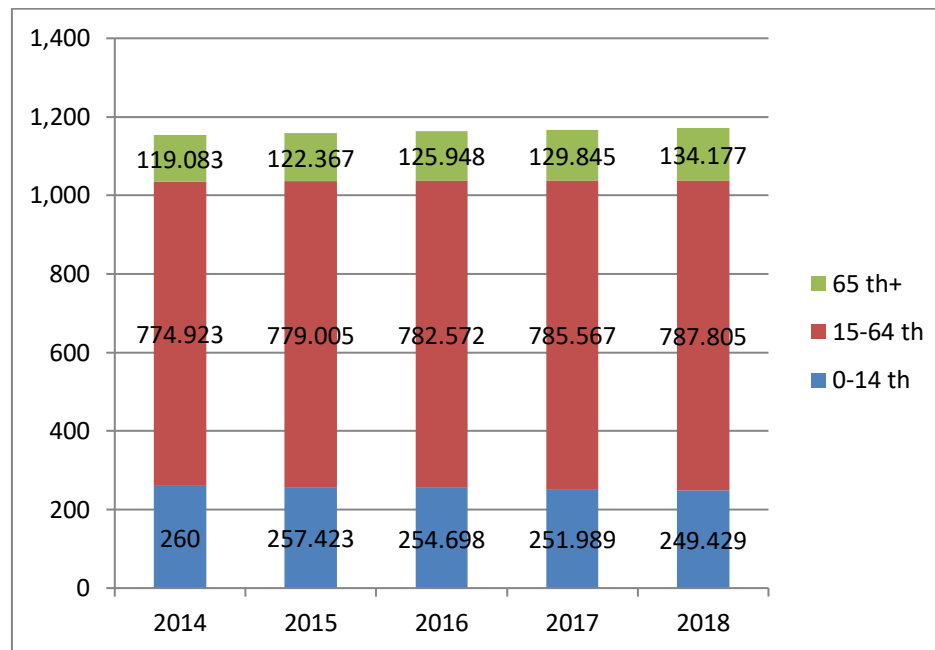


Gambar 1. TPAK, TPT, Pekerja di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2018

Rasio Beban Tanggungan (RBT).

Rasio Beban Tanggungan (RBT), adalah angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Makin besar rasio ketergantungan berarti makin besar beban tanggungan bagi kelompok usia produktif. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu angka **ketergantungan rendah**, apabila nilainya kurang dari 30%, angka **ketergantungan sedang**, apabila mempunyai nilai 30-40%, dan angka **ketergantungan tinggi**, apabila mempunyai nilai lebih dari 41%.

Dari data yang ada dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni Tahun 2014 hingga Tahun 2018, RBT Kabupaten Klaten masih menunjukkan angka lebih dari 41 %,namun kecenderungan berkurang dari tahun 2014 sampai tahun 2017, walaupun di tahun 2018 mengalami peningkatan. pada Tahun 2014 sebesar 48.92%, pada Tahun 2015 sebesar 48.75%, pada Tahun 2016 sebesar 48.64%, Tahun 2017 sebesar 48.61% dan Tahun 2018 sebesar 48.69 Untuk memudahnya melihat perkembangan RBT, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2. Rasio Beban Tanggungan (RBT) Di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Kesejahteraan Sosial

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

United Nation Development Programme (UNDP) merumuskan Pembangunan Manusia sebagai upaya perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan serta daya beli, sehingga memperoleh/menemukan manfaatnya terutama dalam hal produktivitas, pemerataan, pemberdayaan dan kesinambungan.

IPM merupakan suatu indek komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu 1. Diukur dari Usia Hidup Panjang dan Sehat (Angka Harapan Hidup ketika lahir), 2. Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan Angka Harapan Lama sekolah (*Expected Year Schooling*) dan rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun keatas (*Mean Years of Schooling*), dan 3. Standard hidup layak yang diukur dengan konsumsi perkapita riil yang sesuai (*PPP-Purchasing Power Parity*-dalam rupiah). IPM Kabupaten Klaten selalu meningkat. Pada Tahun 2016 sebesar 73,97, pada Tahun 2017 sebesar 74,25 dan pada Tahun 2018 sebesar 74,79 lihat TABEL 5.41

Jika dipersandingkan dengan beberapa kabupaten se Eks Karesidenan Suarakarta (SUBOSUKAWONOSRATEN), maka IPM Kabupaten Klaten sebagai urutan ke 4 (empat). Oleh karena itu perlu ada upaya pemerintah kabupaten, dengan mengintervensi program dan kegiatan yang dapat menopang peningkatan IPM Kabupaten Klaten, lihat Tabel 5.8 di bawah.

Tabel 4. IPM Se-Subosuka Wonosraten Tahun 2016-2018

NO	KAB/KOTA	2016	2017	2018	Rangking
1	BOYOLALI	72,18	72,64	73,22	6
2	KLATEN	73,97	74,25	74,79	4
3	SUKOHARJO	75,06	75,56	76,07	2
4	WONOGIRI	68,23	68,66	69,37	7
5	KARANGANYAR	74,90	75,22	75,54	3
6	SRAGEN	71,43	72,40	72,96	5
7	SURAKARTA	80,76	80,85	81,46	1

Sumber: BPS Jawa Tengah.

Kemiskinan

Adanya kemiskinan adalah faktor penting pengaruhnya terhadap suatu perekonomian baik nasional maupun daerah, semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka semakin tinggi pula beban perekonomian suatu negara atau daerah. Tujuan Pembangunan Global atau *Millenium Goals (MDGS)* kemiskinan merupakan salah satu fokus utama dalam tujuan pembangunan global. Dalam kajian ini, dalam mengukur kemiskinan berpedoman pada Badan Pusat Statistik (BPS), yakni menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Melalui pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang sisi pengeluaran.

Garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum pangan dan non pangan secara esensial. Garis kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kalori/kapita/hari dan kebutuhan non pangan seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Perhitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. **Penduduk Miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis kemiskinan.

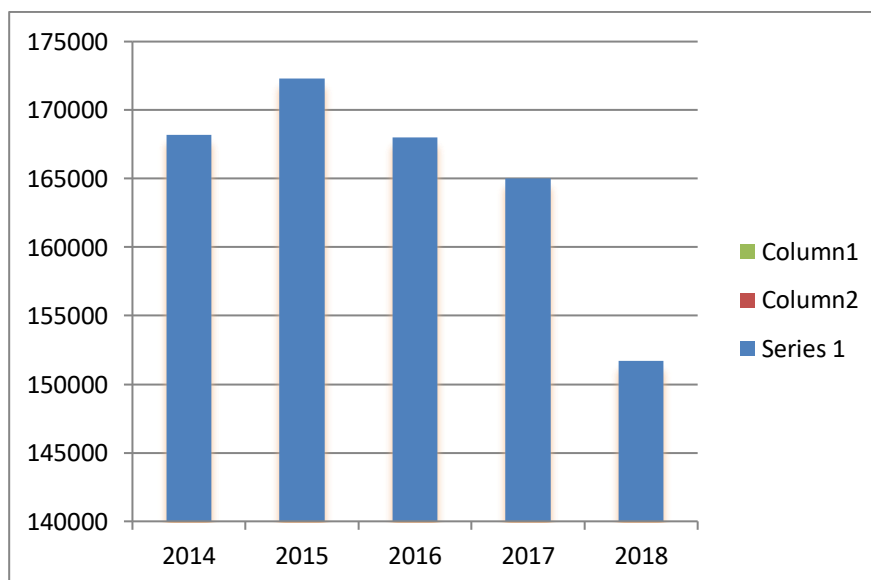
Berikut ini disajikan data Jumlah Penduduk miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 hingga 2018.

Tabel 6

Jumlah Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan Di
Kabupaten Klaten 2014-2018

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	GARIS KEMISKINAN (Rp/kapita/Bulan)
1	2014	1.154.028	168.200	14.56	327 231
2	2015	1.158.795	172.300	14.89	340 484
3	2016	1.163.218	168.000	14.46	364 240
4	2017	1.167.401	165.000	14.15	376 305
5	2018	1.171.411	151.700	12.96	397 447

Sumber: BPS Klaten



Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten 2014-2018

Menurut **Tambunan (1996)** ada suatu korelasi negatif antara tingkat pendapatan dan kemiskinan, semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita semakin rendah tingkat kemiskinan. Kabupaten Klaten selama 5 tahun terakhir (2016-2018) mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, namun 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang positif, fenomenanya juga diikuti dengan menurunnya jumlah penduduk miskin. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin 168.000 jiwa, Tahun 2017 jumlah penduduk miskin turun menjadi 165.000 jiwa, Tahun 2018 jumlah penduduk miskin turun menjadi 151.700 jiwa atau 12.96%. Pengangguran menurut penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Unika Atmajaya Jakarta (Indriani Rosi, 2006), pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia selama Tahun 1985 sampai Tahun 2002, menyatakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan tingkat pengangguran. Jadi, untuk menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dari beberapa uraian di atas diharapkan bahwa kecenderungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada beberapa tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, diharapkan juga dapat menurunkan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran sehingga pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan yang berkualitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari berbagai uraian data-data dan analisa secara deskriptif kualitatif, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Aspek Spasial

- 1) Pada Tahun 2015 sebesar 106 Ha, wilayah kecamatan yang mengalami pengurangan lahan cukup besar dari 6 Ha hingga 18 Ha, ada 7 Kecamatan yaitu tersebar di Kecamatan Klaten Tengah 6 Ha, Kecamatan Karangnom 7 Ha, Kecamatan Prambanan 8 Ha, Kecamatan Delanggu 10 Ha, Kecamatan Klaten Selatan 11 Ha, Kecamatan Klaten Utara 11 Ha. Dan Kecamatan Ceper 18 Ha
- 2) Pada Tahun 2016 sebesar 48 Ha, wilayah kecamatan yang mengalami pengurangan di atas 6 Ha, hanya ada 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Ceper 7 Ha, dan Kecamatan Delanggu 7 Ha.
- 3) Pada Tahun 2017 sebesar 45 Ha, namun seluruh wilayah kecamatan hanya mengalami pengurangan lahan kurang dari 6 Ha ,
- 4) Pada Tahun 2018 sebesar 1078 Ha, seluruh wilayah kecamatan yang mengalami pengurangan lahan cukup besar antara 6 Ha hingga 175 Ha, dan hanya ada 4 Kecamatan yang pengurangan lahan dibawah 6 Ha, yaitu Kecamatan Prambanan 4 Ha, Kecamatan Bayat 4 Ha, Kecamatan Krangdowo 1 Ha dan Kecamatan Kemalang 3 Ha
- 5) Pada tahun 2018 Kecenderungan pengurangan lahan mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu mencapai sebesar 175 Ha yang terjadi di Kecamatan Cawas. Dan pengurangan lahan diatas 50 Ha hingga 97 Ha ada 7 Kecamatan, yang tersebar di Kecamatan Jogonalan dengan luas 97 Ha, Kecamatan Ceper dengan luas 97 Ha, Kecamatan Polanharjo 84 Ha, Kecamatan manisrenggo dan Wonosari masing-masing 77 Ha, Kecamatan tulung seluas 66 Ha dan Kecamatan Juwiring seluas 55 Ha. Perubahan yang cukup besar dimungkinkan karena adanya tumbuh kawasan industri baru, dan juga semakin berkembangnya daerah wisata baru yang ada di kabupaten Klaten. Hal yang paling penting adalah mengendalikan

pola ruang sesuai dengan peruntukannya dan peran stakeholder, sehingga perubahan fungsi lahan dengan adanya pengurangan luas lahan sawah benar-benar dapat dikendalikan.

- 6) Penggunaan lahan untuk lahan pertanian masih cukup luas, sehingga belum menunjukkan kekhawatiran akan terjadi perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran.

Aspek Non Ekonomi.

- 1) Dari sisi sosiodemografi dapat disimpulkan antara lain bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten termasuk klasifikasi rendah 0,35% per tahun, namun mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi Tahun 2018 yaitu sebesar 2.241 Jiwa/km².
- 2) TPAK Tahun 2016 adalah 67,79 %, pada tahun 2018 turun menjadi 66,81 % . Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan yang signifikan, pada Tahun 2016 sebesar 4,35%, Tahun 2018 sebesar 3,11% . Untuk penduduk yang bekerja pada juga mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar 95,65%, Tahun 2018 sebesar 96,86% , hal ini memberikan gambaran bahwa strategi pembangunan di kabupaten Klaten dapat berjalan dengan baik
- 3) IPM Kabupaten Klaten selalu meningkat. Pada Tahun 2016 sebesar 73,97, pada Tahun 2017 sebesar 74,25 dan pada Tahun 2018 sebesar 74,79, angka tersebut menurut standar UNDP 2001 sudah termasuk tinggi, Kondisi IPM ini menunjukkan perkembangan yang positif dan perlu terus ditingkatkan.
- 4) Jika dipersandingkan dengan beberapa kabupaten se Eks Karesidenan Surakarta (SUBOSUKAWONOSRATEN), maka IPM Kabupaten Klaten sebagai urutan ke 4 (empat). Oleh karena itu perlu ada upaya pemerintah kabupaten, dengan mengintervensi program dan kegiatan yang dapat menopang peningkatan IPM Kabupaten Klaten.
- 5) Kabupaten Klaten yang berturut-turut selama 3 tahun terakhir (2016-2018) mengalami pertumbuhan ekonomi positif, diikuti dengan menurunnya jumlah penduduk miskin, yakni Tahun 2016 sebesar 168.000 jiwa, tahun 2017 sebesar 165.000 jiwa dan tahun 2018 sebesar 151.700 jiwa .Dengan demikian kondisi ini perlu terus dipertahankan sehingga diharapkan sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan dampak baik terhadap naiknya kelompok penduduk yang berpendapatan rendah menjadi lebih tinggi, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA [*Times New Roman 11 bold*]

Bank Indonesia Solo.2015.*Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Eks Karesidenan Surakarta Semester I 2015*.Surakarta.

BPS Kabupaten Klaten. *Klaten Dalam Angka 2019*. Klaten

BPS Provinsi Jawa Tengah. 2019. *Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018*. Klaten

BPS Klaten. *Pemerataan Pendapatan Kabupaten Klaten 2019*. Klaten.

BPS Klaten. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klaten 2019*. Klaten.

BPS Klaten. *Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Klaten 2019*. Klaten.

Bappeda Kabupaten Klaten. 2011. *Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Klaten*. Klaten.

Bappeda Kabupaten Klaten. 2015. *Laporan Akhir KED Kabupaten Klaten 2015*.

Bappeda Propinsi Jawa Tengah. 2019. *Studi Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah*.

Bappeda Kabupaten Klaten. 2015. *Kajian Pengembangan Produk Unggulan daerah Kabupaten Klaten*.

Bappeda Kabupaten Klaten. 2015. *Penyusunan Kawasan Ekonom Kreatif Prambanan-Deles Kabupaten Klaten*.

Bappeda Kabupaten Klaten. 2015. *Penyusunan Kawasan Ekonom Kreatif Jimbung-Prambanans Kabupaten Klaten*.

Brannen, Julia. 1993. *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*. Avebury, Aldershot, Brookfield USA, Hongkong, Singapore, Sidney: Thomas Coram Research Unit Institute of Education.

Jingan, ML. 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, cetakan ke empat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal perbendaharaan Kanwil Propinsi Jawa Tengah. 2014. *Kajian Fiskal Regional Jawa Tengah*.

Abdul Haris¹, Rismanto Gatot Trisilo², Tri Utami³
/WIJoB Vol 1 No 1 Tahun 2022

Keputusan Bupati No 050/91/Tahun 2017 tentang Lokasi Klaster Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Klaten

Lincoln Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Daerah*. BPFE.
Yogyakarta.